

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2000). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Baharuddin, B. (2015). Akuntabilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar. *MIMBAR Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2).
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- DISKOMINFO, K. W., BAPPEDA, K. W., & BPS, K. W. (2017). *Indikator Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten wonosobo Tahun 2017*. Wonosobo: DISKOMINFO Kabupaten Wonosobo.
- Djalil, R. (2011). *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. RMBOOKS.
- Dwiyanto, A. E. a. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Gray, R., Bebbington, J., & David, C. (2006). NGO Civil Society and Accountability: Making the People Accountability to Capital. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 19(31), 319–348.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanifah, S. I. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8).
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

- Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1), 9–21.
- Hasan, I. (2006). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Cetakan kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Husodo, A. T. (2017). *Menuju Desa Bebas Korupsi. PKSANHAN-LAN*. Jakarta.
- Ibad, M. I., & Suryani, B. S. (2015). Menuju Desa Terbuka. *Working Paper Untuk Jurnal Wacana*. Yogyakarta: Infest.
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Liputo, S. M. N. (2015). *Penerapan E-Government Kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maryono. (2010). *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Natsir, M. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: Gehalia Indonesia.
- Parker, L., & Gould, G. (2000). *Changing Publik Sektor Accountability: Critiquing New Directions*. Blackwell Publisher.
- Peters, B. G. (2000). *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge.
- Puji, A., & Widayiswara, M. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. *JUKLAK BIMKON*.

- Rachman, N. A., & Sejati, T. A. (2017). *Membangun Desa Bebas Korupsi. Pusat Kajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Universitas Diponegoro.
- Rahmawati, D. E. (2010). *Diktat Metode Penelitian Sosial Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY. Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY*.
- Randa, F., & Daromes, F. (2014). Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 477.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sinclair, A. (1995). The Chamelon of Accountability: forms and discourses. *Accounting Organization and Society*, 20(2), 219–237.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (1992). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soleha, N. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*, 13(1).
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi.”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukyadi, D. (2009). *Model Interoperabilitas Sistem Informasi Layanan Publik Studi Kasus: EGovernment*. Universitas Indonesia.
- Sutiono. (2015). Bagaimana Keuangan Desa Dikelola. Retrieved from <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>
- Suwigno. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Balai Aksara Yudhistira dan Pustaka Saadiyah.

- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, I. S. (2016). Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 87–100.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber lainnya:

Regulasi

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Bupati Wonosobo No 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2017.
- Peraturan Bupati Wonosobo No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018.
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kepolisian Resor Wonosobo dan Kejaksaan Wonosobo dengan nomor 140/9/2017; B/3/2017/ResWsb; dan B-364/0.3.38/04/2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Wonosobo.

Situs Online

Alimah. *Wonosobo jadi Daerah Model Percontohan "Open Data Keuangan Desa"*. <https://sekolahdesa.or.id/wonosobo-jadi-daerah-model-percontohan-open-data-keuangan-desa>, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 13.21 WIB.

Indriani. *Marwan Jafar: Pemberdayaan Desa Kunci Kesejahteraan Rakyat*. <https://www.antaraneews.com/berita/491834/marwan-jafar-pemberdayaan-desa-kunci-kesejahteraan-rakyat>, diakses pada 11 Maret 2018 pukul 15.36 WIB.

Pratomo, Harwanto Bimo. *Gurih-gurih Sedap Korupsi Dana Desa sampai 900 Kades Terciduk Aparat*. <https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 09.26 WIB.

Rohman, M. Abdul. 2018, *Alokasi DD Wonosobo Turun Rp 7 Miliar*. <http://www.suaramerdeka.com/news/detail/5643/2018-Alokasi-DD-Wonosobo-Turun-Rp-7-Miliar>, diakses pada 6 April 2018 pukul 20.11 WIB.

Sjafrina, Almas. *Et.al. Cegah Korupsi Dana Desa*. <https://antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>, diakses pada 20 Maret 2017 pukul 22.34 WIB.

_____. *Open Data Desa Kabupaten Wonosobo*. <https://datadesa.wonosobokab.go.id>, diakses pada 16 Maret 2018 pukul 19.49 WIB.

_____. *Infest Yogyakarta: Bagaimana Proses Penerapan Open Data Keuangan Desa di Wonosobo?* <https://www.youtube.com/watch?v=44D0MKnjhto&t=61s>, diakses pada 17 Maret 2018 pukul 05.42 WIB.

_____. *ICW: Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp. 30 Miliar*. <http://id.beritasatu.com/home/icw-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-30-miliar/163930>, diakses pada 17 Maret 2018 pukul 21.21 WIB.